

**PEMBERDAYAAN BURUH BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Neni Alyani¹, Eko Budi Santoso², Nuke R. Maulandani³ dan Enjang Hidayat⁴

¹²³⁴Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, KM. 20 Jatinangor, 456363

E-mail: nenialyani5@gmail.com; budi_santoso@ipdn.ac.id; enjang@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Tulisan ini mendeskripsikan upaya pemberdayaan buruh batik di desa Bakaran Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada penerapan dan langkah-langkah pemberdayaan di desa Bakaran. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan buruh batik yang perlu diselesaikan dengan cara mengubah strategi dan model pemberdayaan yang ada yang sesuai dengan permasalahan yang muncul. Disarankan kepada pemda agar mengembangkan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi dan tantangan daerahnya, dengan mereplikasi program pemberdayaan yang berhasil di daerah lain.

Kata kunci: Pemberdayaan; Usaha Kecil; Buruh; Batik; Kabupaten Pati

***EMPOWERMENT OF BATIK BAKARAN LABORERS IN PATI REGENCY,
CENTRAL JAVA***

ABSTRACT. *This paper describes the efforts to empower batik laborers in Bakaran village, Pati Regency, Central Java. This study uses a qualitative approach by conducting interview and observation. The results show that there are problems with the implementation and empowerment methods in the Bakaran village. Some factors hinder the empowerment process of batik laborers that need to be resolved by changing the existing strategies and empowerment models according to the problems that arise. It is recommended that local government develop community empowerment according to the potential and challenges of the local, by replicating successful empowerment programs in other regions.*

Key words: *Empowerment; Small Business; Laborer; Batiik; Pati Regency.*

PENDAHULUAN

Dalam pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program yang diunggulkan. Upaya penanggulangan kemiskinan dengan mengedepankan sudut pandang yang menuntut semua pihak, termasuk masyarakat sendiri aktif didalamnya (Sumodiningrat, 1998).

Pemberdayaan ini dipercaya dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama untuk jangka panjang. Bersama dengan jaring pengaman social seperti bantuan social, kesehatan, dan bantuan langsung tunai yang diperuntukan untuk jangka pendek, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk memperkuat kemandirian masyarakat untuk jangka panjang.

Pemberdayaan pada dasarnya diartikan sebagai pemberian kekuasaan, kekuatan, atau daya (*power*) kepada kelompok yang lemah sehingga mereka memiliki kekuatan untuk berbuat untuk dirinya (Ife, 1999).

Sumodiningrat (1999) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan

Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Karsidi (2001) berpendapat bahwa inti pemberdayaan masyarakat ialah memotivasi dan mendorong agar masyarakat mampu menggali potensinya dan mampu memperbaiki kehidupan dirinya. Ia menambahkan bahwa pendekatan dan strategi pemberdayaan

masyarakat dapat ditempuh melalui langkah-langkah: 1) Memulai dengan tindakan mikro; 2) pengembangan ekonomi strategis berdasarkan kondisi dan potensi lokal; 3) Mengubah paradigma pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan; 4) Membangun kembali; 5) Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis; 6) Pengembangan kesadaran politik; 7) Membangun jaringan strategis; 8) Kontrol kebijakan; 9) Menerapkan model pembangunan berkelanjutan.

Tampubolon et al. (2006) melalui penelusuran menggunakan model pemberdayaan, pola pemberdayaan dengan pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE tingkat keberhasilannya ditentukan paling penting oleh pembinaan kelompok, kemudian selanjutnya kepuasan anggota kelompok, kepemimpinan kelompok, keefektifan kelompok, kekompakan kelompok, fungsi tugas kelompok, dan terakhir tujuan kelompok. Sehingga pembinaan atau pemberdayaan kelompok menjadi hal krusial bagi keberhasilan kelompok usaha bersama.

Widjajanti (2011) melalui hasil penelitiannya menggunakan analisis statistic dengan menggunakan structural equation model (SEM) mengklaim bila pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan modal manusia dinilai akan lebih berhasil. Artinya pemberdayaan akan lebih baik lagi jika didukung oleh pengembangan kemampuan pelaku pemberdayaan.

Arfianto & Balahmar (2014) pemberdayaan usaha kecil perlu diberi kesempatan akses modal usaha. Akses yang diberikan juga diharapkan juga dengan prosedur yang lebih mudah dan ringkas. Selain itu, untuk memberdayakan usaha kecil perlu juga diberikan fasilitas dan bantuan untuk membuka pasar agar pengusaha kecil bisa menjual produknya.

Senada dengan Arfianto & Balahmar (2014), Rifai (2013) menyebutkan dalam pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah pengrajin kerupuk ikan di Sidoarjo, pemberian dana untuk meningkatkan produksi sangat berguna bagi para pengrajin.

Namun bila pemberdayaan masyarakat desa bergantung pada dana desa, pemberdayaan masyarakat diklaim tidak akan berjalan efektif (Putra et al., 2012). Hal ini dikarenakan dana desa tidak diperuntukan sesuai dengan peruntukannya dan malah lebih banyak digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa.

Desa Bakaran merupakan salah satu Desa di Kabupaten Pati yang masyarakatnya memiliki kebudayaan membatik sejak zaman dulu. Batik Bakaran memiliki sejarah yang panjang yang konon telah ada sejak zaman Majapahit. Dipercaya asal mula dari budaya batik yaitu dari budaya keratin yang kemudian menjadi tradisi masyarakat di Desa Bakaran.

Batik Bakaran telah menjadi salah satu ciri khas dari Kabupaten Pati. Selain sebagai komoditi oleh-oleh khas Pati, batik bakaran pun dijadikan seragam wajib untuk pegawai negeri sipil di Kabupaten Pati. Namun, kondisi pembatik dan buruh bati, terutama di Desa Bakaran masih kurang mendukung untuk mendukung kelestarian batik ini. Mulai dari minat pemuda terhadap kerajinan batik bakaran yang semakin menurun sehingga makin sulit mencari penerus pengrajin batik, taraf hidup dari membatik yang kurang memadai untuk dijadikan mata pencaharian, dan berbagai kesulitan lainnya membuat batik bakaran semakin terancam eksistensinya bila tidak segera diatasi.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati melakukan program pemberdayaan buruh batik terutama di Desa Bakaran kabupaten Pati. Tulisan ini berusaha memaparkan program pemberdayaan dan kondisi masyarakat yang diberdayakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian menggunakan wawancara dan observasi. Rentang waktu penelitian dilakukan selama dua minggu pada minggu pertama dan kedua di Januari 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Memberikan Pelatihan Membuat Batik Kepada Para Pengrajin Batik.

Pembinaan dan pengembangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pasal 1 Ayat (2) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Sedangkan pemberdayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pasal 1 Ayat (3) adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Pemberian pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa Bakaran untuk lebih menguasai kerajinan membuat batik.

Masyarakat Desa Bakaran sudah memiliki kemampuan untuk membuat batik karena kerajinan membuat batik ini telah menjadi tradisi turun menurun sejak zaman dulu sampai sekarang. Masyarakat Desa Bakaran sudah memiliki kemampuan untuk membuat batik dengan teknik yang berbeda-beda sehingga perlu adanya pelatihan untuk saling membantu dan bertukar pikiran untuk menciptakan kreasi yang baru. Generasi tua yang banyak menjadi pengrajin batik sedangkan generasi muda kurang tertarik pada prosesnya, oleh sebab itu pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan untuk membuat batik saja tetapi juga distribusi batik sampai ke luar daerah untuk menarik minat generasi muda.

Upah yang didapat kurang menjanjikan untuk kaum muda jadi mereka lebih memilih

untuk memasarkan Batik Bakaran ke daerah lain dari pada mereka membuat batik dirumah.

Memasarkan batik ke daerah lain dapat menjadi pengalaman sendiri bagi generasi muda untuk memulai suatu industri kecil, dari proses tersebut mereka bisa memperoleh kegiatan yang positif. Dibutuhkan pengusaha muda dalam usaha batik bakaran yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang produksi untuk membuka lowongan pekerjaan.

Pelatihan dilaksanakan satu hari, tetapi dilaksanakan dari pagi sampai sore sehingga dapat memberikan banyak keterampilan kepada para pengrajin. Pelatihan yang diberikan mulai dari menyiapkan bahan, membuat pola, memberikan warna sampai dengan proses pengeringan kain hasil membuat batik.

Pemilihan bahan alami, penggunaan alat dengan baik dan penghematan bahan yang digunakan juga diajarkan dalam pelatihan ini agar para pengrajin dapat lebih profesional dalam membuat batik serta dapat menggunakan bahan baku secara efektif dan efisien.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun langsung ke lapangan memberikan pelatihan membuat batik dan mendampingi saat proses pelatihan berlangsung. Pelatihan ini diberikan agar para pengrajin dapat menghasilkan produksi batik yang lebih bagus sehingga pendapatan yang diterima menjadi meningkat. Dengan adanya pelatihan membuat batik ini. Pemerintah Kabupaten Pati juga mengharapkan agar muncul para pengusaha batik baru sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelatihan masih kurang, tempat yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan di kantor Balai Desa Bakaran. Peralatan yang digunakan untuk pelatihan juga sedikit, sehingga pengrajin yang dapat mengikuti pelatihan hanya sedikit. Sangat dibutuhkan peran pengusaha industri kecil batik untuk membantu Pemerintah dalam proses pelatihan batik bakaran. Perlu adanya dukungan dalam pelaksanaan pelatihan bukan hanya dari Pemerintah saja tetapi dari pengusaha batik itu sendiri.

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang Jenis Usaha Kecil Pasal 3 menjelaskan bahwa usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan. Bidang/jenis yang dicadangkan untuk usaha kecil menurut Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang Jenis Usaha Kecil Pasal 1 Ayat (2) adalah bidang/jenis usaha yang ditetapkan untuk usaha kecil yang perlu dilindungi, diberdayakan, dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sertanya.

B. Memberikan bantuan peralatan kepada pengusaha industri kecil batik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Pengertian tersebut mengatakan bahwa usaha kecil bukan bagian dari usaha menengah atau usaha besar, sehingga diperlukan usaha pemberdayaan dari pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan kepada pengusaha industri kecil batik berupa: kompor, kain, canting, lilin (malam), tetapi pemberian bantuan tersebut bersyarat harus menggunakan proposal pengajuan bantuan.

Pemerintah memberikan kebijakan untuk semua pengusaha industri kecil di Kabupaten Pati untuk membuat proposal permohonan

bantuan peralatan dengan jumlah tertera pada proposal permintaan bantuan.

Tabel 1. Daftar Penambahan Peralatan yang Diajukan

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket.
1	Kompor	5 buah	Cukup
2	Wajan	5 buah	Cukup
3	Kain	10 meter	Bisa ditambah
4	Canting	10 buah	Cukup
5	Lilin(malam)	5 kg	Cukup

Sumber: wawancara dengan pemilik industri kecil batik bakaran

Menurut Kusnanto dalam Bertha (1982:121) bahwa “industri kecil adalah sebagai usaha di dalam proses produksi yang ada, didalamnya perubahan bentuk atau sifat barang, dalam proses itu faktor manusia dalam kalkulasinya lebih menentukan dari faktor alam.” Bertha (1982:127) menggolongkan industri kecil menurut kegunaannya sebagai berikut:

1. Industri kecil yang bergerak di bidang pemenuhan keperluan rumah, adapun jenisnya adalah sebagai berikut:
 - a. Industri kecil pembuat meubelair
 - b. Industri kecil pembuat ayam-ayaman bambu
 - c. Industri kecil pembuat genteng
3. Industri kecil yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, antara lain:
 - a. Industri kecil pembuat tepung kaji
 - b. Industri kecil pembuat garam rakyat
 - c. Industri kecil pembuat tempe dan tahu
 - d. Industri kecil pembuat minuman keras
 - e. Industri kecil pembuat minyak kelapa
 - f. Industri kecil pengawet ikan
4. Industri kecil yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan sandang, antara lain:
 - a. Industri kecil pertenunan

b. Industri kecil pembuat sepatu

c. Industri kecil Pembatikan

Bantuan yang di berikan oleh pemerintah kepada pengusaha industri kecil batik bakaran sangat membantu dalam proses perkembangannya faktor alam juga sangat berpengaruh pada proses pembuatan batik bakaran ini. Kondisi geografis Desa Bakaran dekdeengan Laut Jawa sehingga air menjadi payau ini yang membedakan dengan daerah lain. Air payau adalah campuran air tawar dan air laut (air asin).

Jenis tanah yang ada Desa Bakaran adalah mediteran sehingga berbeda dengan daerah lainnya. Mediteran atau di sebut tanah kapur adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Dengan kondisi tanah tersebut masyarakat Desa Bakaran kurang cocok untuk lahan pertanian, sehingga masyarakat Desa Bakaran banyak yang berprofesi menjadi buruh batik.

C. Pendirian Rumah Batik Tulis Bakaran.

Pendirian Rumah Batik Tulis Bakaran bertujuan untuk menampung batik-batik yang dihasilkan buruh batik agar mendapatkan harga sepentasnya. Seperti koperasi yang menampung hasil dari petani rumah batik tulis bakaran juga sebagai koprasa yang di peruntukan kepada para buruh batik dan pengusaha batik untuk menitipkan barangnya.

Rumah batik dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pati, selain sebagai koperasi rumah batik adalah sebagai tempat pembelian oleh-oleh batik untuk wisatawan. Pemerintah Kabupaten Pati berharap dengan adanya Rumah Batik ini, pemerintah daerah dapat membantu memasarkan hasil produksi usaha industri kecil batik di Desa Bakaran. Selain membantu memasarkan batik bakaran, pembuatan rumah batik ini untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha industri kecil batik. Dengan adanya rumah batik pemerintah mengajak para pengusaha industri kecil batik menjadi sebuah kelompok kerja yang memiliki tujuan yang sama yaitu melestarikan batik bakaran. Dibentuknya asosiasi bertujuan untuk

melakukan suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Asosiasi batik bakaran bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan batik bakaran dan memberdayakan buruh batik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Asosiasi batik bakaran di Desa Bakaran Bapak Agus pada tanggal 26 Januari 2015 diperoleh informasi yakni:

“Pemerintah Kabupaten Pati mewajibkan seluruh PNS penggunaan seragam batik bakaran untuk hari kamis, batik model baru yang menjadi identitas sebagai seragam PNS adalah Batik Mina Tani.”

Pembuatan batik dibicarakan antara Pemerintah dengan ketua Asosiasi untuk penentuan warna, jenis kain, waktu dan harga yang di anggarkan. Sekitar 5.000 di pesan dengan anggaran 1 orang Rp. 100.000.- pengerjaanya selama 2 minggu, melalui ketua Asosiasi di sebarakan ke anggota Asosiasi untuk sama-sama melakukan pembuatan sesuai pesanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Asosiasi dapat disimpulkan bahwa pendirian Asosiasi ini bukan hanya sebagai sarana perkumpulan para pengusaha saja, tetapi mereka juga membuat suatu kegiatan untuk melestarikan batik bakaran. Berdirinya asosiasi juga harus diimbangi dengan sarana pendukungnya berupa rumah batik untuk menampung hasil batik dari anggota asosiasi dan masyarakat pengrajin batik lainnya.

D. Promosi batik tulis bakaran sebagai produk unggulan daerah baik di dalam maupun di luar provinsi.

Batik adalah ekspresi budaya yang memiliki makna simbolis yang unik bagi masyarakat Indonesia. Keunikan itu yang membedakan kita dengan Bangsa lain, sehingga dapat menjadi identitas dan jati diri bangsa. Setiap daerah memiliki identitas yang berbeda-beda sesuai dengan budayanya.

Pemerintah Kabupaten Pati sedang bersemangat untuk mempromosikan batik

bakaran sebagai identitas dan jati diri daerah. Kegiatan promosi dilakukan dengan cara yang sebagai berikut:

1) Pemakaian seragam bagi PNS diwajibkan

Batik Bakaran semakin dikenal dan menjadi identitas masyarakat Pati. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati pada tahun 2014 mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan batik bakaran sebagai seragam resmi PNS pada hari Kamis. Seluruh pegawai di Kabupaten Pati memakai batik dengan corak, warna, kain yang sama tanpa ada perbedaan antara pejabat dan staf, sehingga menciptakan kebersamaan dan keseragaman bagi para pegawai.

Pemakaian seragam batik bakaran ditetapkan pada tahun 2014 wajib oleh para PNS ini merupakan salah satu bentuk promosi kekayaan budaya karena memang batik bakaran menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Pati yang menyimpan nilai seni yang tinggi.

Penulis melakukan observasi saat di lapangan saat tidak hanya PNS saja yang memakai batik bakaran, tetapi banyak perusahaan wiraswasta, sekolah, toko, dan rumah sakit juga memakai batik bakaran sebagai seragam. Masyarakat kabupaten Pati sadar akan menggunakan batik bakaran sebagai identitas dan kebanggaan tersendiri.

2) Wisata Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Pati melakukan banyak kegiatan promosi tentang Batik bakaran tidak saja menjadikan seragam wajib yang digunakan PNS, tetapi sebagai wisata kebudayaan juga. Berbagai macam kegiatan dengan tema batik bakaran dilakukan untuk menarik wisatawan datang di Kabupaten Pati. Kegiatan yang dilaksanakan seperti:

a) Pameran Seni Batik

Pemerintah telah mendirikan Museum Batik Tulis Bakaran yang beradanya di Kabupaten Pati. Dengan mendirikan museum batik bertujuan untuk lebih mengembangkan kegiatan pariwisata. Di dalam museum ini terdapat berbagai macam motif-motif batik bakaran mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Selain melihat batik bakaran

pemerintah juga memfasilitasi pelatihan membuat batik untuk para pengunjung museum.

b) Pameran Busana Batik Bakaran

Pati *Night Carnival* merupakan pameran busana dengan tema “Batik Pati Lingsir Wengi” dengan menggunakan batik bakaran. Berbagai macam peserta yang mengikuti acara tersebut mulai dari pelajar SMA, SMK, masyarakat umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Acara yang baru di selenggarakan pertama kali di Kabupaten Pati ini menarik banyak wisatawan hadir untuk melihat, tidak hanya masyarakat lokal saja, tetapi banyak juga wisatawan asing. Diharapkan dengan adanya promosi batik tulis bakaran sebagai produk unggulan Kabupaten Pati di dalam dan di luar provinsi, masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengenal batik tulis bakaran dan dapat mengetahui bahwa batik tulis bakaran tidak kalah kualitasnya dengan batik tulis Solo, Jogja ataupun Pekalongan yang sudah terkenal, pendapatan yang diperoleh buruh batik bakaran yang ada di Desa Bakaran juga akan meningkat dengan terkenalnya Batik Bakaran.

E. Pengembangan Sentra Usaha Batik Yang Ada Di Desa Bakaran.

Pemerintah Kabupaten Pati sudah berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bakaran melalui usaha industri kecil batik yang ada di Desa Bakaran. Pemerintah daerah juga membuat sentra usaha industri batik yang terletak di Desa Bakaran, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat buruh batik pemerintah melakukan berbagai upaya.

Sentra usaha batik ini dikembangkan di Desa Bakaran karena merupakan tempat pertama lahirnya batik Bakaran, banyak sejarah budaya dari zaman dulu sampai sekarang. Jalan menuju Desa Bakaran yang mudah dijangkau karena terletak dekat dengan jalan pantura lintas provinsi para pengunjung dapat melihat proses pembuatan batik bakaran tradisional secara langsung. Di Desa Bakaran terdapat banyak usaha industri kecil batik bakaran selain itu pengunjung juga dapat

mencoba berbagai macam olahan hasil laut yang berada di sana karena Desa Bakaran terletak di dekat Laut Jawa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengembangkan sentra usaha batik adalah membuat patung perempuan sedang membatik lengkap dengan peralatan membatik di depan Desa Bakaran yang terdapat tulisan sentra usaha batik bakaran, sehingga pengunjung dari luar Kabupaten Pati dapat dengan mudah menemukan Desa Bakaran. Usaha kecil batik bakaran juga banyak di pinggir-pinggir jalan Desa Bakaran, sehingga para pengunjung dapat dengan mudah menemukan letak usaha batik yang akan dikunjungi.

Pemerintah Kabupaten Pati juga memperbaiki sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Bakaran seperti perbaikan jalan, pembuatan selokan, pembuatan masjid, dan lain sebagainya. Perbaikan jalan sering dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati karena jalan di daerah tersebut sering rusak akibat banjir air laut pasang surut hal ini dilakukan agar para pengunjung yang datang di Desa Bakaran merasa nyaman, aman dan semakin hari dapat semakin bertambah.

F. Hambatan dalam Pemberdayaan Buruh Batik di Kabupaten Pati

Hambatan/kendala merupakan halangan, rintangan yang membatasi pencapaian sasaran yang akan dituju dan dapat membatasi untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Hambatan dalam pemberdayaan buruh batik adalah halangan yang membatasi seseorang untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan buruh batik dilakukan Pemerintah agar buruh batik dapat berdaya mempunyai kekuatan untuk menata kehidupannya sendiri, tetapi masih banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

1. Budaya Masyarakat Saat Bekerja

Budaya masyarakat pembatik sering mempengaruhi produktifitas batik. Budaya masyarakat yang menginginkan proses yang singkat dengan hasil yang bagus itu sangat tidak mungkin. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan batik dengan kualitas bagus

memerlukan waktu yang panjang. Setiap rumah industri batik memiliki batik-batik yang berbeda dengan yang lain, dalam segi warna, kain, kemasan tetapi memiliki corak dan bentuk yang sama yaitu Batik Bakaran yang merupakan batik khas daerah setempat.

Perbedaan ini menjadi hal yang mencolok banyak rumah industri lain yang memberikan harga murah dengan kualitas yang jelek, sehingga produk yang jelek tersebut mempengaruhi produk yang bagus. Hasilnya pembeli kecewa dengan kualitas batik, harga akan turun dan konsumen tidak percaya lagi dengan batik tersebut. Budaya seperti ini harus dihilangkan di masyarakat buruh batik.

Pemerintah juga harus lebih ketat memantau produksi batik yang akan dihasilkan dan mematok standar kualitas batik yang di pasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kebiasaan buruh pembatik yang semangat pada awal masa kerjanya kemudian setelah seminggu berjalan malas bekerja ini juga menimbulkan efek yang kurang baik kepada buruh batik yang lainnya. Di masyarakat desa khususnya sering menyoroti atau melihat saja apa yang dilakukan rekan kerjanya karena tidak ingin menyinggung perasaan tetapi kebiasaan tersebut akan merusak pekerja yang lainnya. Banyak diantara buruh batik yang menginginkan upah yang tinggi tetapi malas bekerja. Oleh sebab itu sistem pengupahannya menggunakan sistem borongan.

2. Kurangnya Motivasi Pada Diri Buruh Batik

Motivasi diciptakan dalam diri masing-masing individu, berupa motivasi baik untuk semangat bekerja, tetapi banyak buruh batik yang turun motivasi karena berbagai macam hal pada diri mereka salah satu kurangnya motivasi adalah masalah kesejahteraan buruh batik yang masih rendah.

Masyarakat pembatik memiliki kemampuan untuk mencapai kesejahteraan yang baik. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menuju ke arah yang baik, dimana orang-orang dalam keadaan makmur dalam keadaan sehat dan damai. Nasib buruh batik tidak seindah kain batiknya. Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan dengan masyarakat buruh batik kaum tua di Desa Bakaran Ibu ponirah pada tanggal 26 Januari 2015 diperoleh informasi yakni:

“Upah yang di berikan sesuai dengan apa yang dikerjakan atau bisa di sebut upah borongan. Buruh batik bekerja dari pagi sampai sore hari, tergantung pekerjaan yang bisa di lakukan. Pembatikan tahap awal di lakukan di rumah masing-masing seberapa sanggup buruh batik lakukan, setelah mengambil kain barulah proses pengerjaanya dilakukan di rumah. Setelah selesai di kembalikan lagi ke rumah produksi untuk proses selanjutnya, pembayaran hasil kerja diberikan dengan hasil kerja yang dihasilkan”.

Misalnya: dalam sehari buruh batik mampu menghasilkan proses pembatikan tahap awal sekitar 20 kain berarti $15 \times 1.500 = 22.500$ pendapatan buruh batik berbeda beda perharinya sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa buruh batik di berikan upah sesuai dengan pekerjaan yang di hasilkan. Pembatik bukan menyelesaikan satu batik saja tapi model pekerjaannya borongan per tahap berbeda-beda buruh yang mengerjakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Bab X perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pada bagian kedua pengupahan pasal 89 ayat 1 (a) upah minimum berdasarkan wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota. (b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Menurut observasi yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa upah yang diperoleh para buruh pembatik masih dibawah UMR Kabupaten Pati. Upah yang didapatkan per harinya tidak menentu tergantung pekerjaan yang telah mereka

kerjakan karena sistem pengupahannya adalah sistem borongan.

Pembatik dapat menerima upah setelah melaksanakan pekerjaannya, upah diberikan per hari setelah melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan jenis pekerjaan. Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan buruh batik semakin banyak penghasilan yang di dapatkan.

Proses membatik masih bersifat tradisional untuk mempertahankan budaya yang ada dan melestarikan warisan nenek moyang. Proses pembatikan masih dilakukan dengan cara tradisional sehingga dapat menghasilkan batik dengan kualitas yang baik. Tahapan-tahapan membuat batik bakaran dengan upah borongannya yakni:

Tabel 2. Tahapan Proses Membatik Beserta Upahnya

No	Proses	Jumlah	Upah
1	Molani	1 Kain	Rp. 1.500
2	Ngengreng	1 Kain	Rp. 2.000
3	Isen-isen	1 Kain	Rp. 1.000
4	Nemblok	1 Kain	Rp. 2.300
5	Mendhel	1 Kain	Rp. 500
6	Ngerok	1 Kain	Rp. 500
7	Ngremok	1 Kain	Rp. 500
8	Mbironi	1 Kain	Rp. 1.000
9	Nyoga	1 Kain	Rp. 500
10	Nglorot	1 Kain	Rp. 500

Sumber: wawancara dengan pemilik industri kecil batik bakaran

Masing-masing tahap memiliki kesulitan tersendiri dalam proses pengerjaannya, upah yang diberikan juga berbeda tergantung tingkat kesulitan dan waktu pengerjaannya. Tahapannya seperti:

1. Molani: membuat desain atau motif batik.
2. Ngrengekeng: melukis desain atau motif yang ada menggunakan lilin (malam) untuk tahap pertama dengan mengikuti pola.
3. Isen-isen: mengisi motif dengan ornamen-ornamen yang telah di buat pada proses sebelumnya. Isen-isen dibedakan menjadi 2 yaitu: a) Cecek: titik-titik kecil yang membentuk sebuah ornament. b) Sawut: garing yang diulang-ulang untuk menutupi sebuah ornamen yang nantinya akan diwarnai sogan(coklat).
4. Nembok: menutupi dengan lilin (malam) bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih.
5. Medhel: perwarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutupi oleh lilin (malam) kemudian di jemur.
6. Ngerok: pengerokan pada ornamen sawut yang akan diberikan warna sogan (coklat)
7. Ngremok: mengucek dan mencuci bagian yang dikerok agar bersih dari lilin
8. Mbironi: melakukan proses pembatikan kembali menggunakan canting untuk menutup bagian ornamen cecek dan ornamen lainnya yang akan tetap dipertahankan pada pewarnaan pertama.
9. Nyoga: pencelupan warna coklat tua atau coklat gosong.
10. Nglorot: menghilangkan lilin dari kain dengan air panas.

Semakin banyak warna dan motif pada batik maka proses pembuatannya membutuhkan waktu yang panjang. Batik dengan proses dan tahapan yang baik akan menghasilkan produk yang baik juga oleh sebab itu di perlukan dukungan dari berbagai pihak salah satunya pengusaha batik dan Pemerintah Daerah.

Dengan pengerjaan yang tergolong susah sering kali buruh batik turun motivasi untuk bekerja, dibutuhkan dukungan dari pengusaha dan pemerintah untuk menciptakan suasana

yang nyaman di tempat kerja agar buruh batik merasa dihargai keberadaannya.

3. Kurangnya modal Usaha

Permasalahan yang sering dihadapi oleh buruh batik untuk berkembang adalah kurangnya modal yang dimiliki untuk mendirikan produksi batik sendiri. Buruh batik yang berasal dari kalangan menengah ke bawah banyak yang ingin mempunyai produksi batik sendiri tetapi minimnya modal yang dimiliki sehingga mereka hanya dapat menjadi buruh batik saja.

Bantuan dari pemerintah masih banyak buruh batik yang belum merasakannya. Minimnya pengetahuan buruh batik juga menjadi factor penghambat dalam pemberdayaan buruh batik sering kali buruh batik tidak mengetahui bagaimana memasukkan proposal bantuan. Perlu adanya bantuan dari pengusaha industri batik bersama pemerintah memberdayakan buruh batik karena modal usaha yang besar merupakan faktor pengahambat bagi buruh batik untuk mengembangkan kemampuannya pada bidang produksi.

4. Belum Optimalnya Koordinasi dengan Lembaga lain

Koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lain ini merupakan faktor penghambat bagi buruh batik berkembang. Buruh batik hanya mengetahui masalah batik saja karena rata-rata buruh batik dari kalangan menengah ke bawah, pekerjaan membatik sudah banyak menyita waktu mereka. Setiap hari hanya membatik dan mengurus rumah oleh sebab itu mereka sulit berinteraksi dengan masyarakat lainnya, buruh batik hanya sering berinteraksi dengan pemilik rumah produksi dan rekan sesama di tempat kerja.

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberikan pembinaan terhadap buruh batik kurang menyeluruh. Pemberian bantuan dari pemerintah dengan membuat proposal bantuan

berupa alat batik kurang dimengerti oleh buruh batik. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan buruh batik Ibu Dari sini pada tanggal 25 Januari 2015 diperoleh informasi yakni:

“Sebenarnya buruh batik ingin berkembang tetapi melihat pekerjaan membatik sudah menyita waktu yang banyak setiap harinya. Buruh batik telah nyaman dengan pekerjaan membatiknya, mereka lebih memilih setiap harinya memiliki pekerjaan dari pada harus merugi karena batiknya tidak terjual di pasaran. Susahnya meminta bantuan pada pemerintah dengan syarat mengajukan proposal permintaan bantuan dirasa sangat rumit bagi buruh batik.”

Berdasarkan wawancara di atas para buruh batik tidak mau pusing dengan produksi batik, mereka sudah nyaman dengan pekerjaannya sehari-hari membatik. Sebenarnya mereka ingin berkembang dan memiliki rumah produksi sendiri tetapi banyaknya hambatan yang mereka hadapi akhirnya mereka hanya dapat membatik saja.

5. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan buruh batik di Kabupaten Pati adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Sarana dan prasarana sangat penting untuk kemajuan bersama tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak di antaranya: masyarakat, pemilik usaha industri kecil, dan pemerintah harus sama-sama menjalin kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama.

Di Desa Bakaran merupakan Desa pesisir pantai memiliki tanah mediteran jenis tanah pesisir pantai yang sering banjir karena air laut pasang surut, sehingga menyebabkan jalan sering mengalami kerusakan.

Pemerintah telah mengupayakan perbaikan jalan di Desa Bakaran tetapi dengan kondisi tanah seperti itu memudahkan jalan untuk sering rusak. Banyak sarana dan prasarana yang rusak mengakibatkan

terhambatnya pengembangan produksi di Desa Bakaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Bakaran Bapak Bektu pada tanggal 23 Januari 2015 diperoleh

informasi yakni:

“Perbaikan sarana dan prasarana dalam hal ini jalan umum sudah sering dilakukan oleh pemerintah dan dibantu oleh masyarakat Desa Bakaran tetapi jenis tanah pesisir yang kurang bagus mengakibatkan jalan sering rusak. Setiap ada jalan yang rusak Kepala Desa melapor kepada Pemerintah agar secepatnya memperbaiki jalan yang rusak, tetapi pembenahan jalan tidak dapat secepat pelaporan perlu adanya peninjauan yang lebih lanjut oleh pemerintah”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor alam juga dapat mengakibatkan rusaknya sarana prasarana pendukung di dalam pelaksanaan pemberdayaan buruh batik. Sarana dan prasarana sangat penting bagi terciptanya kondisi produksi yang kondusif. Sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan buruh batik untuk melakukan pekerjaannya sering kurang, mulai dari kompor terbatas, minyak langka, masalah seperti ini sering dihadapi buruh batik saat melakukan pekerjaannya. Kondisi ini sangat mengganggu proses pembatikan.

Sarana dan prasarana untuk pemasaran yang paling di butuhkan buruh batik untuk penjual batik yang mereka buat. Buruh batik hanya bisa membatik tanpa dapat memasarkan produknya, pemasaran yang dilakukan buruh batik hanya di tetangga sekitar rumah, sanak saudara dan desa tetangga saja.

Oleh sebab itu sarana dan prasarana pendukung perlu untuk mendukung pemberdayaan buruh batik serta produksi batik di Desa Bakaran Kabupaten Pati.

SIMPULAN DAN SARAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan buruh batik bakaran di Kabupaten Pati melakukan pemberdayaan dengan cara melatih para pembatik kepada pengrajin batik, memberikan bantuan peralatan, mendirikan rumah batik tulis bakaran, promosi batik, dan pengembangan sentra batik.

Namun dalam perjalanannya pemberdayaan masyarakat dan usaha batik bakaran mengalami hambatan-hambatan seperti masih kurangnya motivasi buruh batik, budaya masyarakat yang masih membuat tidak berubah, kurangnya modal usaha, belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lain, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Terlihat bahwa dari hambatan yang muncul, semuanya justru terkait faktor-faktor yang dapat membuat proses pemberdayaan berhasil. Seperti misalnya Karsidi (2001) berpendapat bahwa inti pemberdayaan masyarakat ialah memotivasi masyarakat agar lebih mandiri. Pengembangan kemampuan pelaku pemberdayaan juga penting untuk memotivasi masyarakat. Selain itu, Arfianto & Balahmar (2014) dan Rifai (2013) mengklaim bila pemberian modal dan prosesnya yang tidak berbelit-belit serta perbaikan sarana dan prasarana sangat berguna bagi proses pemberdayaan usaha kecil menengah untuk berhasil. Bahkan pemerintah daerah perlu mencarikan dan membuka pasar bagi produk untuk dijual, sehingga hasil produksi dapat selalu terserap.

Pada akhirnya, pemerintah daerah perlu memerhatikan dan mengembangkan proses dan praktik pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan tantangan di daerahnya masing-masing. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan memperhatikan, mempelajari, atau bahkan mereplikasi program pemberdayaan yang berhasil di daerah lain. Selain itu, perlu juga melihat kajian-kajian tentang pemberdayaan di Indonesia agar selalu *up to date* mengenai praktik pemberdayaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP*, 2(1), 53–66.
- Bertha, I Nyoman, 1982, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: Graha Indonesia
- Ife, Jim. 1995. *Community Development, Creating Community Alternatives: Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Karsidi, R. (2001). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *MEDIATOR*, 2(1), 115–125.
- Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang Jenis Usaha Kecil
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203–1212.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- Rifai, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 130–136.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Sumodiningrat, G. 2000. *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA.

- Tampubolon, J., Sugihen, B. G., Samet, M., Susanto, D., & Sumardjo. (2006). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 10–22.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.